

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Felisa, A. (2016). *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*. Makassar.
- Ismail, I. N. (2021). *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Dalam Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Pinrang*. Makassar.
- Joko, P. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Kontemporer*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pupr, K. (2021). *Buku Panduan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta: UPT Negeri Yogyakarta.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Bandung: Nusa Media.
- Yuliah, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sukabumi, 3(2), 28–42.

Jurnal

- Abd. Haris, & Tahir, S. (2022). Kebijakan Pemerintah Melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Penataan Ruang Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 137–154. doi: 10.59050/jian.v19i1.165
- Amalia, D., Rochim, A. I., & Rahmadanik, D. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Menunjang Pembangunan Di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 51–58.
- Aries Syafrizal, S. M. (2021). Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi)*, 1(1), 71–79. Retrieved from <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/9>
- Boni, E., & Saleh, M. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung Pasca Berlakunya Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 20(2), 415–425. Retrieved from <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/360>
- Indra Kristian, Aulia Fitriani Rahma, Bayu Nugraha, & Cinta Amalia Putri. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 11–22. doi: 10.54783/dialektika.v18i3.70
- Irawan, B. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 54–68.
- Noorrachmi, & Saipul. (2024). Informasi Manajemen Bangunan Dan Gedung (Simbg) Dalam Penerbitan Pbg Dan Slf Di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Pada Efektivitas Aplikasi Simbg Terhadap Penertiban Pbg Dan Slf). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2020), 16318–16327.
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90.
- Riswari, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal IPDN*, 11(1), 1–14. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) Di Kota Depok Tahun 2018. *JKKI: Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 07(02), 64–73. Retrieved from <https://core.ac.uk/reader/295415910>
- Rohalia, D. R., & Meilani, L. N. (2023). Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4517–4525. Retrieved from <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/9>
- Saputro, A., & Lutfi, A. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangun di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah ...*, 8(2), 105–119. Retrieved from <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1798>
- Sitorus, G. K., Rares, J. J., & Plangiten, N. N. (2020). Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91), 72–79.
- Situngkir, R. (2021). Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2, 664–672. doi:

- Suryani, B. B., Kambolong, M., & Suci Nurzakinah. (2024). TRANSFORMASI E-GOVERNMENT DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota. *Journal Publicuho*, 7(2), 765–779. Retrieved from <http://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/432%0Ahttp://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/432/286>
- Tanthowi, I., & Herlindah, S. (2024). Kepastian Hukum Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Rumah Toko atau Kantor. *Jurnal Hukum*, 15(3), 1–14.
- Warsito, H. T. (2016). Kebijakan dan Manajemen Publik Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraron Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 2313-341X.
- Wibowo, A. A., & Pratomo, S. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Era Masyarakat Informasi. *Jurnal Media Administrasi*, 3, 42–49. Retrieved from <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/MAD/article/view/2715%0Ahttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/MAD/article/viewFile/2715/1675>

Skripsi

- George, R. (2019). Implementasi Corporate Social Responsibility di PT. Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkit Gresik. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 157–165. Retrieved from [http://repository.unair.ac.id/100003/3/3.BAB_I_PENDAHULUAN .pdf](http://repository.unair.ac.id/100003/3/3.BAB_I_PENDAHULUAN.pdf)
- Pratama, A., Sebayang, S., & Darma, D. A. (2023). *Keseimbangan Governance Dan Goverment Dalam Dunia Digital*. In Researchgate.Net (Issue June). Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Dito-Aditia-Nasution/publication/371256745_Keseimbangan_Governance_dan_Goverment_dalam_Dunia_Digital/links/647b1b8e2cad460a1bf12b7d/Keseimbangan-Governance-dan-Goverment-dalam-Dunia-Digital.pdf
- Puspitasari, R. (2022). *Kualitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Banyuwangi*. Jember.
- Putra, A. R. (2021). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah*. July, 1–23.
- Putri, F. N., & Prabawati, I. (2024). Kajian Standar Program Siaran Pada Kpid Jawa Timur (Sebuah Studi Implementatif Tentang Peraturan Kpi Nomor 02/P/Kpi/03/2012). *Publika*, 278–291. doi: 10.26740/publika.v12n1.p278-291
- Rahmawati, P. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang*. Parepare.

Sarwoto. (2018). *Implementasi Kebijakan Monitoring Dan Evaluasi Badan Akreditasi Provinsi Di Lampung*. Institut PTIQ Jakarta.

Sosiawan, E. A. (2008). Evaluasi implementasi e-government pada situs web pemerintahan daerah di indonesia: prespektif content dan manajemen. *Seminar Nasional Informatika*, 1(5), 88–98. Retrieved from <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang *Bangunan Gedung*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2020.